

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lebih dari 10-15 tahun terakhir, perkembangan budaya di Korea Selatan berjalan dengan sangat pesat hingga menghasilkan sebuah fenomena demam budaya Korea yang sering disebut dengan istilah *hallyu* atau *Korean Wave*. Istilah tersebut merujuk pada produk-produk budaya populer Korea seperti drama televisi, film, musik-musik populer (K-pop), *dance* (B-boys), video games, makanan, *fashion*, pariwisata, dan juga bahasa. Pada dasarnya, popularitas fenomena ini berawal dari Asia terutama di China pada tahun 1990, kini *hallyu* merambah dunia internasional yang lebih luas hingga Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Serikat.¹ Penyebaran *hallyu* ini tidak lepas dari adanya fenomena globalisasi, dimana batas-batas antara negara dianggap telah pudar sehingga bermacam-macam arus budaya asing dapat masuk ke berbagai negara dengan sangat mudah dan cair. Hingga pada tahun 1994, Kim Young Sam, Presiden Korea Selatan saat itu, mendeklarasikan globalisasi sebagai visi nasional dan sasaran strategi pembangunan. Rencana tersebut kemudian dimanifestasikan Menteri Budaya Korea, Shin Nak Yun, dengan menetapkan abad 21 sebagai “*century of culture*”.²

Menelusuri sejarah dunia budaya populer, menduniannya *hallyu* saat ini bukanlah sebuah fenomena yang baru. Beberapa tahun sebelumnya, Amerika dan Jepang telah mengawali sejarah dengan *Hollywood* dan *Harajuku*. Dari sekian fenomena budaya populer yang merebak di dunia internasional, Fredric Jameson megutarakan kritiknya bahwa,

¹Gunjoo Jang, Won K. Paik, *Korean Wave As Tool For Korea's New Cultural Diplomacy*, *Advances In Applied Sociology*. Vol.2, No.3, 2012. Hal.196-202, Pdf.

²Shim, Doobo. “*Hibridity And The Rise Of Korean Popular Culture In Asia*”, *Media, Culture, And*

*“tidak ada yang baru, hanya ada hal-hal yang lama, daur ulang, loak, dan seriring dengan ini terjadi perebutan masa lalu dengan harapan dapat menemukan beludru merah yang tak diproduksi lagi atau pakaian biba yang terlupakan, yang dimasukkan kembali dalam dunia citra dan diberi makna sebagai sesuatu yang lama sekaligus baru.”*³

Kritik tersebut menggambarkan bahwa budaya *hallyu* bukanlah sesuatu yang hal baru dan mencengangkan, *hallyu* mengambil dan memanfaatkan budaya-budaya populer terdahulu sebagai dasarnya, yang kemudian diproses dan dihiasi dengan berbagai perombakan sehingga melahirkan satu budaya populer yang terlihat seperti baru. Singkat kata, budaya *hallyu* ini hanyalah fenomena jangka pendek yang akan bertahan hanya dalam beberapa tahun saja.⁴

Menengok sejarah hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan, pada dasarnya hubungan tingkat konsuler kedua negara telah terjalin sejak kisaran tahun 1966, dan berlanjut lagi pada hubungan dalam tingkat diplomatik di tahun 1973. Hubungan kenegaraan dalam bentuk *Government to Government* (G to G) ini diwujudkan melalui berbagai hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik yang bahkan telah terjalin sejak masa kepemimpinan Bung Karno. Hubungan tersebut juga sudah memberikan dampak sangat baik bagi kedua negara terutama dalam hubungan politik internasional khususnya pada isu-isu kemanusiaan. Keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok juga telah mendekatkan hubungan antara Indonesia dengan Korea Utara, sehingga dalam masa tersebut Indonesia mendapatkan posisi sebagai penengah dalam konflik Semenanjung Korea.⁵

³Angela Mcrobbie, *Posmodernisme And Pop Culture* (Terjm.),Routledge, London,1994.

⁴Shin Kyeong-Mi, “*Hallyu Yeolpungeun Asia Gongtong Munhwa Changchurui Kiwodeu: Ilbonui Hallyu*” (The Hot Korean Wave Is The Key Word To The Creation Of Asian Common Culture: Korean Wave In Japan). Pp. 221-61 In *Dongasiaui Hallyu* (Korean Wave In East Asia), Edited By Yoon-Whan Shin And Han-Woo Lee. Seoul: Jeonyewon. Shin Yoon-Whan, “*Dongasiaui Hallyureul Boneun Nun: Damnongwa Silche*” (A View Of The Korean Wave In East Asia: Discourses And Reality). Pp. 11-47 In *Dongasiaui Hallyu* (Korean Wave In East Asia), Edited By Yoon-Whan Shin And Han-Woo Lee. Seoul: Jeonyewon. Dalam Jonghoe Yang, *The Korean Wave (Hallyu) In East Asia: A Comparison Of Chinese, Japanese, And Taiwanese Audiences Who Watch Korean TV Dramas*, Development And Society, Volume 41, Number 1, June 2012, 103-147.

⁵Yang Seung Yoon, *Perjalanan Studi Bahasa Indonesia Di Korea : Dahulu, Sekarang Dan Mendatang*. Jurnal Humaniora. Vol.19. No.2 Juli 2007. Hal.175-184.Pdf.

Hubungan kedua negara pada dekade pertama menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan, dimana Indonesia menjadi partner penting Korea Selatan pada bidang ekspor impor. Hingga sejak sekitar tahun 2000-an, hubungan antara Korea Selatan dengan Indonesia mulai menapaki masa baru. Seiring kebijakan Presiden Kim Young Sam, *Segyehwa*, kebijakan yang menitikberatkan perhatian pemerintah pada bidang ekonomi, politik dan budaya. Maka, ekspansi kebudayaan Korea Semakin meningkat dan dikenal masyarakat dunia.

Konsep hubungan diplomatik yang semula berkuat pada konsep G to G pun, pada masa ini mulai menyentuh ranah *People to People* (P to P). Konsep diplomasi yang lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung hubungan baik antar kedua negara dengan nilai-nilai kebudayaan menjadi media diplomasinya, mulai terlihat dalam arah gerak politik luar negeri Korea Selatan, tidak terkecuali terhadap Indonesia. Komitmen atas konsep baru dalam kerjasama dua negara ini pun kemudian diperkuat dengan sebuah perjanjian antara Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan dalam hal kerjasama kebudayaan yang ditandatangani pada 28 Nopember 2000.

Kendati fenomena budaya tersebut sebenarnya hanyalah sebuah komoditas marketing dan bisnis yang melibatkan upaya-upaya promosi, publikasi dan juga agen-agen perusahaan untuk menjual komoditas budaya saja,⁶ namun ekspansi konten budaya yang menyajikan warna budaya Korea Selatan menjadi sesuatu hal “baru” dikalangan masyarakat internasional. Dari ini juga, istilah *hallyu* mulai dikenalkan pada dunia, dan juga telah disebut sebagai *soft power* pemerintah Korea Selatan sebagai pengikat hubungan antara dua negara.⁷

Lebih jauh, munculnya *hallyu* sebagai salah satu *soft power* yang dapat mengikat hubungan dua negara, terlihat dalam acara peringatan 40 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kedutaan besar Korea Selatan di Jakarta menyelenggarakan konser musik yang menghadirkan beberapa ikon *hallyu*, seperti *boyband* Super Junior, Shinee, Beast, 2PM, Infinite

⁶Mark Ravina, *Introduction: Conceptualizing The Korean Wave, Essay Introduces The “Korean Wave”*, Special Feature of this Volume of the *SERAS*, Emory University, Southeast Review Of Asian Studies, Volume 31 (2009), Pp. 3–9.

⁷Ibid.

and Teentop, *girlband* Sistar dan penyanyi solo Eru. Menurut Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun, acara ini merupakan tanda hubungan baik antara Indonesia dengan Korea Selatan, dan juga antara Jakarta dengan Seoul.⁸ Bahkan pada beberapa waktu silam, Hyun Bin, salah satu bintang *hallyu* telah dinobatkan sebagai duta militer Korea Selatan. Kedatangan bintang papan atas, Hyun Bin sebagai perwakilan militer Korea Selatan dalam lawatannya ke Indonesia, kian mencerminkan adanya penggunaan *hallyu* sebagai media diplomasi dan telah menyentuh ranah “*high politic*”.

Sehingga dari beberapa hal tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah Korea Selatan telah memanfaatkan *hallyu* dan berbagai aktor didalamnya sebagai media dan pelaku diplomasi terhadap negara-negara sahabat termasuk Indonesia yang memainkan peran untuk mempromosikan Korea dalam satu strategi yang populer.⁹ Dari pemanfaatan *hallyu* sebagai media diplomasi publik, Korea Selatan telah berhasil mendapatkan keuntungan ganda, yakni prestis dan keuntungan ekonomi. Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia menjadi target yang sangat baik bagi pemasaran *hallyu*, terbukti dengan banyaknya konsumsi masyarakat terhadap berbagai konten *hallyu* yang tinggi sehingga berdampak pada pemasukan pendapatan negara yang kian meningkat.

Akhirnya, dari paparan tersebut muncul pertanyaan terkait dengan hubungan antara Korea Selatan dengan Indonesia, terkhusus pada hal konsep diplomasi publik kekinian, dimana *hallyu* menjadi salah satu *icomnyaa*.

⁸Andreas D. Arditya, ‘*Hallyu*’ To Highlight Korea-Indonesia Ties In March The Jakarta Post, 5 Januari 2013, (Online), [Http://Www.Thejakartapost.Com/News/2013/01/05/Hallyu-Highlight-Korea-Indonesia-Ties-March.Html](http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/05/hallyu-highlight-korea-indonesia-ties-march.html). Diakses Pada 1 Juli 2014.

⁹Wei Na, Lee,dkk., “Celebrity Advertising In Japan And Korea: Doing The Asian Way?” CTC Research, (online),<http://www.kaseywindels.com/CTC/research.html>. dalam Reza LukmandaYudhantara. *Hallyu*Sebagai Soft Power Korea Selatan di Indonesia, UGM,2012.

B. Pokok Masalah

Mengapa pemerintah Korea Selatan baru mulai memanfaatkan budaya *hallyu* sebagai media diplomasi publik terhadap Indonesia sejak tahun 2000-an?

C. Tinjauan Pustaka

Kajian terkait tentang arus budaya Korea atau sering di sebut dengan *hallyu*, sudah terbilang cukup banyak. Selain literatur tentang *hallyu*, penulis juga mencantumkan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah tesis yang ditulis oleh Riza Prima Yanti yang berjudul “Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur: Pemanfaatan *hallyu* sebagai *soft power*”. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa *hallyu* memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan *soft power* Korea Selatan dan menjadi salah satu cara baru diplomasi publik Korea Selatan di kawasan Asia Timur.

Tinjauan pustaka kedua yakni tesis dari Reza Lumanda Yudhantara dengan judul *Hallyu sebagai Soft Power Korea Selatan di Indonesia*. Tulisan beliau menjelaskan tentang proses bagaimana Korea Selatan memanfaatkan *hallyu* sebagai sebuah *soft power* dan respon masyarakat internasional termasuk Indonesia menerima arus budaya tersebut. Sedangkan untuk tinjauan pustaka yang ketiga yakni tesis dari Patria Nurhari yang berjudul *Korea Pop Music Sebagai Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia*. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa *hallyu* merupakan wujud dari *soft power* Korea Selatan dan merupakan salah satu strategi untuk menunjang kepentingan nasional jangka panjang yang mana penelitian tersebut memberikan fokus pembahasan tentang “gelombang lanjutan” dari *hallyu* yang berupa *Korean Music Pop* (K-pop) yang telah mampu menembus pasar musik Amerika Serikat.

Sedangkan Nor Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad, juga menulis sebuah jurnal yang berjudul “*Hallyu di Malaysia: Kajian Sosiobudaya.*”¹⁰ Tulisan ini menjelaskan tentang pengaruh dan popularitas *hallyu* yang sangat tinggi di

¹⁰Nor Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad, *Hallyu di Malaysia: Kajian Sosiobudaya*, Jurnal Komunikasi, *Malaysian Journal of Communication*, Jilid 27(2):203-219.

Malaysia, sehingga dari hal tersebut juga terdapat hasil yang saling menguntungkan bagi kedua negara dalam konteks hubungan diplomatik. Namun, demikian, tulisan tersebut cenderung lebih menggambarkan tentang fenomena hallyu di tengah masyarakat Malaysia dan perkembangan hubungan bilateral dua negara yang saling menguntungkan, dan tidak dijelaskan dampak-dampak lainnya dalam masyarakat secara lebih mendalam dan kritis. Selain itu, hubungan bilateral dengan antara Malaysia dengan Korea Selatan merupakan hubungan yang terjadi pada dua aktor yang memiliki kekuatan seimbang, sehingga hasil yang didapatkan dari hubungan tersebut adalah saling menguntungkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana hasil dari hubungan antara dua negara yang berbeda status, Indonesia sebagai negara berkembang dengan Korea Selatan sebagai negara *midle power*.

Untuk membedakan tulisan penulis dengan tesis-tesis tersebut, dalam penelitian ini, selain membahas tentang *hallyu* sebagai *soft power*, penulis akan memberikan paparan berdasarkan pada pendekatan proses pengambilan keputusan, sehingga *hallyu* yang telah dibahas dalam beberapa literatur tersebut mampu memunculkan dampak lanjutan, terutama pada proses perkembangannya dari komoditas budaya hingga menjadi komoditas kapitalis yang bahkan mampu mempengaruhi urusan-urusan *high politics*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan riset ini adalah :

1. Mengetahui upaya-upaya Korea Selatan dalam membangun perekonomian negara.
2. Mengetahui posisi *hallyu* dari kacamata politik luar negeri Korea Selatan kekinian.
3. Mengetahui berbagai dampak *hallyu* di Indonesia.
4. Mengetahui pola hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan.
5. Mengetahui peran dan posisi Indonesia bagi Korea Selatan.

E. Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana metode inilah yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”.¹¹ Dengan metode ini, penulis akan berusaha untuk menjelaskan atau mengungkapkan gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

F. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui berbagai buku, berita, artikel, jurnal, serta data yang dapat diperoleh dari internet. Selain data sekunder, peneliti juga melibatkan data-data primer yang akan digali melalui beberapa interview.

G. Jangkauan Penulisan

Riset ini akan berfokus pada:

1. Fenomena *hallyu* atau *Korean Wave*.
2. Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia terhadap Korea Selatan.
3. Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Korea Selatan.
4. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Pengamatan ini akan bermula dengan mempelajari sejarah dan perkembangan *Hallyu* dari baik di dunia maupun di Indonesia, sekaligus berbagai fenomena turunan yang kemudian muncul dampak dari arus budaya Korea tersebut.

Sedangkan untuk batasan waktu dalam riset ini adalah kurang lebih dalam 5 tahun terakhir. Dan dalam penulisan riset ini, penulis memberikan fokus perhatian terhadap dampak *hallyu* dalam masyarakat Indonesia dan apabila memungkinkan, maka akan sedikit menyingung dampak yang terjadi di beberapa negara lainnya. Penulis juga akan berfokus pada perkembangan win win *solution* dalam hubungan

¹¹W.J Creswell, *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*,

diplomasi antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam hal sosial budaya dan ekonomi.

H. Kontribusi Riset

Riset ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi berupa :

1. Memunculkan pemikiran yang lebih terbuka dan kritis terhadap kunci-kunci kesuksesan Korea Selatan kekinian.
2. Munculnya pemahaman baru terhadap dampak hubungan diplomasi antara Indonesia-Korea Selatan.
3. Memberikan wacana baru atas potensi dan posisi Indonesia dalam hubungan luar negeri.

I. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan, Konsep Difusi Kebudayaan dan Konsep Diplomasi Publik. Dimana konsep dan teori tersebut dirasa sesuai untuk dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat dan menjadi acuan pemikiran dalam proses mendapatkan hasil penelitian.

1. Teori Pengambilan Keputusan

Pendekatan pengambilan keputusan pertama kali dikenalkan oleh pemikir Yunani, Thucydides, melalui karyanya "*Peloponesian War*" yang memaparkan gagasan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi para pemimpin negara dalam memutuskan berbagai kebijakannya. Dalam hal ini berdasarkan pada pendapat Rosenau proses tersebut memiliki pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal yang berasal dari berbagai peristiwa yang menjadi faktor-faktor yang layak untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan.

Berdasarkan pada perkembangan dunia politik internasional, pendekatan pengambilan keputusan ini juga sudah sering di jumpai dalam berbagai pembahasan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Pun dalam perkembangannya, teori tersebut juga memiliki berbagai jenis pendekatan salah

satunya adalah yang di paparkan Graham T. Allison. Ia memaparkan bahwa untuk dapat memahami kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Model Aktor Rasional atau Model Klasik

Dalam model pertama ini, pilihan kebijakan dilihat sebagai tindakan yang disengaja oleh pemerintah didasarkan pada pemikiran yang logis, berdasarkan pada perhitungan untung-rugi dan kepentingan nasional. Dengan kata lain, pendekatan klasik ini menekankan pada pendekatan yang melihat pada hubungan-hubungan dari berbagai tindakan yang paling masuk akal.¹²

Pendekatan model ini juga telah memberikan banyak kontribusi dalam berbagai penjelasan terkait dengan tindakan-tindakan suatu negara dalam percaturan politik internasionalnya. Kendari demikian, model klasi ini dinilai masih memiliki kekurangan. Model Aktor Rasional atau klasik ini cenderung mengabaikan fakta bahwa si pembuat keputusan dalam hal ini adalah pemerintah, adalah manusia yang bisa membuat kesalahan. Pemerintah sebagai seorang individu telah dan akan menghadapi berbagai peristiwa baik eksternal maupun internal birokrat, kelompok kepentingan, opini publik dan lain sebagainya sehingga memungkinkan adanya pengaruh-pengaruh tertentu.

Sehingga untuk mengatasi kekurangan atas asumsi tersebut, maka Allison kembali memberikan alternatif lain untuk menjelaskan berbagai kemungkinan yang dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, seperti model Politik Birokratik dan Proses Organisasi.

b. Model Politik Birokratik

Model kedua yang ditawarkan oleh Allison adalah Politik Birokratik, dimana pendekatan ini memberikan fokus pada hubungan antara pemerintah dengan aktor-aktor lainnya dalam proses pembuatan keputusan. Pendekatan ini memberikan penjelasan tentang adanya hubungan tawar menawar antara

¹²Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, dalam *Teori-teori Hubungan Internasional*, James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. (Terj.) Harwanto Dahlan. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIPOL. UMY. 1996.

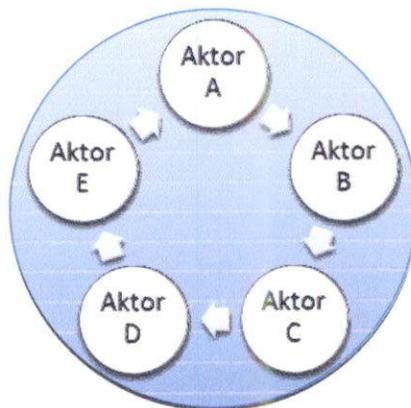
pemerintah dengan agen pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, sehingga dalam proses tersebut akan muncul berbagai alternatif kebijakan yang akan dilakukan. Secara garis besar, model ini menggambarkan adanya kompetisi yang dintensif diantara unit-unit pembuat keputusan dan politik luar negeri merupakan hasil dari proses tawar menawar tersebut.

Allison juga memaparkan adanya dua elemen penting dalam model politik birokrasi ini, yakni:

- *proses organisasi*, merupakan elemen yang menjelaskan tentang aktifitas dalam organisasi-organisasi sebagai kegiatan rutin yang akan mempengaruhi keputusan, dimana dalam prosesnya akan dilakukan pada prosedur standar operasional.
- *Birokrasi*, berfokus pada interaksi antar individu dalam pemerintahan dan interaksinya dalam politik internasional. Melalui proses tersebut, hasil yang dimunculkan merupakan dampak dari permainan politik para birokrat.

Lebih jelasnya, model ini dapat dilihat melalui skema berikut:

Diagram 1.1 Skema Model Birokrasi Politik.



Sumber: diolah.

Diagram tersebut menyebutkan bahwa dalam model pendekatan politik birokratik terdapat beberapa aktor yang berperan dalam proses pembuatan suatu keputusan. Aktor-aktor tersebut akan saling memberikan pertimbangan terhadap suatu isu yang pada nantinya akan dijadikan sebuah kebijakan politik suatu

c. Model Proses Organisasi

Model selanjutnya adalah Proses Organisasi, pendekatan ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja dari suatu organisasi besar dan hanya sebagian yang merupakan hasil koordinasi pemerintah. Dalam hal ini, pemimpin suatu negara akan dapat memberikan pengaruh namun tidak secara substansial mengendalikan organisasi-organisasi tersebut.¹³ Pendekatan ini juga memaparkan tentang tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari keputusan organisasi-organisasi yang didasarkan pada kepentingan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak terlebih dahulu sebelum mengembangkan strategi jangka panjang.

Pada kasus Korea Selatan, model pengambilan keputusan atas kebijakan diplomasi dengan memanfaatkan *hallyu* sebagai media diplomasi publik, dapat dilakukan dengan model politik birokratik. Model kedua ini menjelaskan dengan bahwa sebelum menetapkan *hallyu* sebagai salah satu media diplomasi, pemerintah Korea Selatan bersama dengan beberapa aktor seperti *Chaebol*, media massa dan lain sebagainya telah melalui berbagai pemhasan terkait tentang *hallyu* tersebut.

Sehingga sejak era millennium pemerintah mulai melihat adanya peluang bagi Korea Selatan untuk tampil didunia internasional, sehingga pemerintah mulai merangkul para agen-agen non pemerintah yang terlibat dalam dunia industry kreatif untuk bersama-sama mengembangkan *hallyu*.

2. Konsep Diplomasi Publik

Secara konvensional diplomasi menurut K.J Hosti dalam *International Politics : A Framework For Analysis*, adalah usaha suatu negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional dikalangan masyarakat Internasional.¹⁴ Selanjutnya menurut S.L Roy, diplomasi merupakan seni berunding khususnya bagi negara-negara mengenai keahlian politik.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid.

Sedangkan pengertian diplomasi publik, Menurut Tuch adalah sebuah konsep yang menggambarkan tentang bentuk baru komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap masyarakat dari negara lain dengan tujuan untuk dapat membangun pemahaman atas berbagai nilai maupun ide-ide dari suatu negara, institusi dan budaya yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai, melalui kebijakan pemerintah.¹⁵

Sedangkan berdasarkan pada pengertian yang merujuk pada *Dictionary of International Relations Terms* yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, disebutkan bahwa:

*“public diplomacy refers to government sponsored programs intended to inform of influence public opinion in other countries; its chief instruments are publications, motion pictures, cultural exchange, radio, and television.”*¹⁶

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan sekumpulan program yang didukung oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengaruh opini publik dinegara-negara lain, yang dilakukan melalui pemanfaatan media publikasi, gambar bergerak, pertukaran budaya, radio dan juga televisi. Dengan demikian, untuk menjalankan praktek diplomasi publik, pemerintah memerlukan sebuah sinergi yang baik dari beberapa aktor lain, seperti *non-government organization* maupun *multinational corporations*. Aktor-aktor tersebut kemudian yang akan bergerak secara aktif membangun ide-ide dalam masyarakat melalaui bidangnya masing-masing dimana pada kelanjutannya akan memunculkan sebuah opini publik dalam masyarakat seperti yang dikehendaki.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Signetzer dan Carola bahwa dalam diplomasi publik aktor-aktor selain pemerintah menggunakan pengaruh politiknya secara langsung tanpa identifikasi terlebih

¹⁵H.N Tuch, *Communicating with The World: The US Public Diplomacy Overseas*, New York:St. Martin's Press, 1990, p.3, dalam Patria Nurhari, *Korean Pop Music Sebagai Diplomasi Publik Korea Selatan Di Indonesia*, Tesis, UGM, 2012.

¹⁶US. Departement Of State, *Dictionary of International Relation Terms*, 1987,p.85, dalam “*Public Diplomacy Alumni Association, What is Public Diplomacy?*”,(online) 5 Mei 2008, <http://www.publicdiplomacy.org>) dalam Patria Nurhari, *Korean Pop Music Sebagai Dinlomasi Publik Korea Selatan Di Indonesia*. Tesis. UGM. 2012.

dahulu sebagai kelompok-kelompok politik. Hal tersebut dilakukan karena mereka telah menjadi kuat secara ekonomi.¹⁷ Lebih khusus, praktek diplomasi publik ini lebih menekankan pada pendekatan-pendekatan non ancaman, seperti media, seni, budaya, pendidikan, bahasa dan bantuan-bantuan pembangunan.¹⁸

Diplomasi publik memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan konsep diplomasi tradisional. Menurut Edmund Gullion, diplomasi publik adalah:

*“ ... deals with the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies. It encompasses dimensions of international relations beyond traditional diplomacy: the cultivation by government of public opinion in other countries; the interaction of private groups and the interest in one country with those of another; the reporting of foreign affairs and its impact on policy; communication, as between diplomats and foreign correspondents; and the process of intercultural communication.”*¹⁹

Paparan tersebut menjelaskan tentang publisitas digunakan sebagai elemen yang penting, mengingat orientasi diplomasi ini adalah untuk meningkatkan ketertarikan dan simpati masyarakat internasional atau dengan kata lain adalah membangun citra positif sehingga dampak yang dihasilkan akan membawa negara tersebut pada pencapaian kepentingan nasional yang ditargetkan.

J. Hipotesa

Dari berbagai paparan yang telah dijelaskan, maka hipotesa yang ditarik oleh penulis bahwa *Hallyu* mulai digunakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai media diplomasi publik sejak tahun 2000-an, dikarenakan :

¹⁷Signitzer&Carola, *Public Diplomacy: A Specific Governmental Public Relations Function*, dalam C. Botan&Hazleton(Eds),*Public Relations II*, Mahwah, NJ: Erlbaum, Hal. 435-464. Dalam Reza Prima Yanti, *Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur: Pemanfaatan Hallyu Sebagai Sumber Soft Power*, Tesis, UGM, 2010.

¹⁸K. Dong-gi, *Korean Government's Public Diplomacy Initiatives: Its Context, Current Status, and Challenges*, Ministry Of Foreign Affair and Trade,(online), <http://www.jpi.or.kr/board/run/download/>. Diakses pada 16 september 2014.

¹⁹N.J Cull, *Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of Phrase*, University of Southern California Centre.(Online). http://www.uscpublicdiplomacy.org/index.php/about/what_is_pd.

1. Pemerintah Korea Selatan baru memutuskan langkah pemberdayaan hallyu sejak kisaran tahun tersebut, dikarenakan fokus pemerintah tahun 90-an masih berpusat pada isu-isu perbaikan kondisi perekonomian. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga potensi budaya sebagai *soft power* setelah adanya penetrasi kebudayaan Korea di berbagai negara tetangga yang mampu mendorong tercapainya kepentingan untuk meningkatkan posisi tawar Korea.

2. Pemerintah Korea Selatan mulai memahami keuntungan perkembangan teknologi dan globalisasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kondisi ekonomi Korea Selatan terhadap Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar terbesar bagi Korea Selatan melalui efek domino pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimilikinya.

K. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistem penulisan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian, yakni:

BAB I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan penulisan, kerangka berfikir serta tinjauan pustaka yang akan di gunakan dalam mengawal riset.

BAB II. Perkembangan Politik, Ekonomi dan Perkembangan Budaya Korea Selatan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perkembangan kebudayaan Korea sejak masa kerajaan dan perkembangannya. Selain itu, sejarah singkat juga akan dibahas tentang awal mula lahirnya *hallyu* atau *korean wave*.

BAB III. Perkembangan dan Dampak Hallyu Sebagai Media Diplomasi Publik Korea Selatan

Pada bagian ini penulis memaparkan tentang perkembangan *hallyu* dan kondisi ekonomi dan politik sebelum dan sesudah Korea Selatan mempopulerkan *hallyu*